

# Pemenuhan Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Sekolah Menengah Pertama: Studi Kasus *Need-Assessment* GPA di Kalimantan Timur

ABD. MUIN M.

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

*However, religious education teachers' requirement is an important and strategic factor to be fulfilled. Based on the data, its requirement either on State Junior Secondary School or Private Junior High School in Balikpapan, East Kalimantan can be said that it already fulfilled the requirement based on the calculation ratio between the religious education teachers and the students. It means that every Junior Secondary School, state and private, already available the religious education teachers', so the students have been taught religious teaching as their beliefs and taught by the teacher who has the same religion with them. The problem is how the schools able to fulfill that requirement. In the State Junior Secondary Schools, it is not a big problem because the government supports it. But, the Private Junior High Schools face this as a serious problem. The problem of religious education teachers' requirement comes from internal and external of Junior Secondary School. Internally, it is about fund. Meanwhile, externally it is more founded on the government policy which has not yet sided on the Private Junior Secondary Schools.*

ARTIKEL ini diangkat dari hasil penelitian tentang pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Sekolah Menengah Pertama dengan mengambik kasus di kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Ruang lingkup tulisan ini adalah: pertama, Distribusi GPA, mencakup: penyebaran, pemerataan dan ketercukupannya. kedua, Analisis kebutuhan GPA, mencakup: jumlah GPA, jumlah rombongan belajar,

rasio GPA dengan rombongan belajar dan jumlah GPA yang tersedia serta yang dibutuhkan. Ketiga, Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah, Sekolah dan Yayasan SMP Swasta, dan keempat, Kendala yang dihadapi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan sekolah/yayasan dalam pemenuhan kebutuhan GPA, mencakup faktor internal dan eksternal.

Konsep pemenuhan kebutuhan dalam tulisan ini adalah *need assesment*. Assesment dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi jarak atau gap yang terjadi antara dicita-citakan dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini, Kaufan, Alicia dan Hanna mengemukakan bahwa assesment ini dikaitkan dengan konsep needs yang berarti kebutuhan. Selanjutnya dijelaskan bahwa assesment merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi gap antara realitas yang ada dengan sesuatu yang diinginkan. Kemudian menempatkan gap tersebut ke dalam skala prioritas yang akhirnya memilih salah satu di antaranya untuk dipenuhi.<sup>1</sup> Sejalan dengan pendapat

ini, Angliten & Wiggins mengemukakan, bahwa pada prinsipnya needs assesment merupakan gap antara apa terjadi dengan sesuatu yang diharapkan secara ideal.<sup>2</sup>

Di Kota Balikpapan sebelum tahun pelajaran 2005/2006 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 53, terdiri dari 21 SMP Negeri dan 32 SMP Swasta, tetapi pada tahun pelajaran 2005/2006 dari jumlah tersebut berkurang menjadi 50 SMP dengan jumlah siswa 20.379 orang. Hal ini terjadi disebabkan ada 3 SMP Swasta ditutup, karena tidak ada siswanya, yaitu SMP Al Hurriyah, SMP Sentra Cendikia Muslim (SCM) dan SMP Gajah Mada (Gama). Karena itu, pada saat ini SMP Swasta berjumlah 29 sekolah.

Meskipun jumlah SMP Negeri (21 atau 42%) lebih sedikit dari SMP Swasta (29% atau 58%), tapi dari segi jumlah siswa, ternyata siswa SMP Negeri jauh lebih banyak (14.856 atau 72,90%), sedangkan SMP Swasta hanya mencapai 5.523 siswa (27,10%). Dan SMP Negeri yang terbanyak siswanya adalah SMP Negeri 1, sebab merupakan

---

<sup>1</sup> Roger Kaufan, Akicia M. Rojas & Hanna Mayer, *Needs Assesment A. User's Guide, Education Tecknology* (New Jersey: Pubication, Englewood Cliffs, 1980), p. 3.

<sup>2</sup> A. Angliten & Wiggins J. S, *Personalty Assesment via Questionnaires* (New York: Springer-Verlag, 1986), p. 102.

SMP Unggulan. Sedangkan SMP Swasta yang terbanyak siswanya adalah SMP Kartika.

jumlah siswa SMP kelas 1 lebih banyak (7.085 atau 34,77%) dari siswa kelas 2 (6.780 atau 33,27%) dan siswa kelas 3 (6.514 atau 31,96%). Hal ini menunjukkan, bahwa dari jumlah siswa yang mendaftar dan diterima di SMP (siswa baru) pada umumnya setiap tahun pelajaran mengalami kenaikan. Tapi, jika perhatian ditujukan kepada masing-masing SMP, baik SMP Negeri maupun SMP Swasta, maka dapat dilihat beberapa SMP mengalami penurunan siswa yang mendaftar dan diterima, terutama pada SMP Swasta, khususnya SMP Tunas Bangsa.

## Jumlah Siswa SMP Menurut Agama

Penduduk Kota Balikpapan sebagian besar beragama Islam, juga keadaan ini berimplikasi kepada jumlah siswa SMP Negeri yang sebagian besar beragama Islam, yaitu dari 14.856 siswa SMP Negeri, di antaranya 13.622 (91,69%) beragama Islam. Dan selebihnya hanya sebagian kecil, yaitu 977 (6,58%) siswa beragama Kristen, dan lebih sedikit lagi, yaitu 168 (1,13%) siswa beragama

Katolik, bahkan siswa SMP Negeri yang beragama Hindu dan Buddha kurang dari 1%, yaitu masing-masing 43 (0,29%) dan 46 (0,31%).

SMP Negeri 1 yang merupakan SMP Unggulan memiliki siswa yang terbanyak, jika dibanding dengan siswa SMP Negeri lainnya, Dan dari 1.286 siswa SMP Negeri 1 ini, di antaranya terdapat sebagian besar, yaitu 1.082 (84,14%) siswa beragama Islam, kemudian siswa beragama Kristen 155 (12,05%), selanjutnya siswa beragama Katolik, Buddha dan hindu hanya sekitar 1%.

## Distribusi dan Ketercukupan GPA

### *SMP Negeri*

Dari 67 Guru Pendidikan Agama (GPA) yang tersebar pada 21 SMP Negeri memiliki status kepegawaian dan latar belakang pendidikan yang cukup bervariasi.

Berdasarkan status kepegawaian GPA SMP Negeri, maka cukup besar yaitu 46 GPA (68,66%) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang diangkat oleh Departemen Agama (NIP. 15) maupun diangkat oleh Dinas Pendidikan (NIP. 13), Akan tetapi, masih terdapat 21 GPA (31,34%) adalah GPA Non PNS (honorar). Ini menunjukkan, bahwa

GPA yang bertugas di SMP Negeri masih cukup banyak (31,34%) masih berstatus sebagai GPA honorer.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, juga cukup besar, yaitu 46 (68,66%) GPA yang memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1). Namun, masih cukup banyak GPA yang berpendidikan belum sarjana/S1, yaitu masih memiliki tingkat pendidikan SLTA, D2 atau D3. Ini menunjukkan, bahwa dari segi tingkat pendidikan GPA SMP Negeri masih cukup banyak, yaitu terdapat 21 (31,34%) yang belum memenuhi kualifikasi.

Apabila menelusuri data tentang status kepegawaian dan latar belakang pendidikan GPA SMP Negeri, maka dapat diketahui bahwa GPA yang berstatus PNS semuanya (100%) memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1). Sedangkan GPA yang berstatus Non PNS (honor) semuanya (100%) memiliki tingkat pendidikan SLTA, D2 dan D3 (belum sarjana/S1). Ini menunjukkan, bahwa GPA Non PNS (honor) yang bertugas di SMP Negeri dari segi tingkat pendidikan formal belum memenuhi kualifikasi.

Dengan demikian, SMP Negeri sampai saat ini telah memiliki GPA yang cukup sesuai rombongan bela-

jar dan jumlah jam pelajaran pendidikan agama. Tapi, jika jumlah GPA tersebut dilihat dari status kepegawaian, yaitu PNS dan tingkat pendidikan, maka SMP Negeri masih mengalami kekurangan GPA.

Begitupun dari 67 Guru Pendidikan Agama (GPA) yang tersebar pada 21 SMP Negeri memiliki usia dan masa kerja yang cukup bervariasi. Jika GPA SMP Negeri dilihat dari segi usia, maka terbanyak adalah GPA yang telah berusia antara 32 – 40 tahun, yaitu 27 orang (40,30%), kemudian usia antara 41 – 50 tahun sebanyak 24 orang (35,82%), berikutnya GPA yang berusia 31 tahun atau kurang dari 31 tahun 8 orang (11,94%), sedangkan GPA yang berusia 56 tahun atau lebih hanya sebagian kecil, yaitu 5 orang (7,46%), bahkan GPA yang berusia antara 51 – 55 tahun hanya 3 orang (4,48%). Ini menunjukkan, bahwa GPA yang berusia kurang dari 50 tahun jumlahnya sebagian besar, yaitu 59 orang (88,06%). Dengan kata lain, dalam waktu 5 tahun yang akan datang, GPA yang akan pension hanya 5 orang (7,46%) dan dalam waktu 10 tahun yang akan datang hanya 8 GPA (11,94%) yang memasuki masa pensiun.

Adapun GPA SMP Negeri menurut masa kerja, maka terbanyak adalah GPA yang telah memiliki masa kerja antara 5-10 tahun, yaitu 24 orang (35,82%), kemudian 4 tahun atau kurang dari 4 tahun 15 orang (22,39%), sedangkan GPA yang memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun hanya sebagian kecil, yaitu hanya terdapat 4 orang (5,97%).

### *SMP Swasta*

Dari 48 Guru Pendidikan Agama (GPA) yang tersebar pada 28 SMP Swasta (SMP Tunas Bangsa tidak memiliki GPA) memiliki status kepegawaian dan latar belakang pendidikan yang cukup bervariasi.

Berdasarkan status kepegawaian GPA SMP Swasta, hanya sebagian kecil yaitu 9 GPA (18,75%) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan semuanya (100%) diangkat oleh Departemen Agama (NIP. 15) belum ada GPA diangkat oleh Dinas Pendidikan (NIP. 13), Sedangkan GPA yang berstatus Non PNS (honor) jumlahnya sebagian besar, yaitu 39 GPA (81,25%). Selain itu, hanya terdapat 7 SMP Swasta (25%) memiliki GPA dengan status PNS, selebihnya masih sebagian besar, yaitu 21 (75%) SMP Swasta yang belum memiliki GPA yang berstatus PNS.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, lebih dari separuh, yaitu 31 (64,58%) GPA yang memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1). Namun, masih cukup banyak GPA yang berpendidikan belum sarjana/S1, bahkan terdapat 1 orang (2,08%) GPA yang berpendidikan Strata 2 (S2). Akan tetapi, masih terdapat GPA SMP Swasta yang memiliki tingkat pendidikan SLTA, yaitu 5 orang (10,42%), dan D3 sebanyak 10 orang (20,83%), hanya 1 orang (2,08%) GPA yang berpendidikan D2. Ini menunjukkan, bahwa dari segi tingkat pendidikan GPA SMP Swasta masih cukup banyak, yaitu 16 (33,33%) yang belum memenuhi kualifikasi.

Dengan demikian, baik SMP Negeri maupun SMP Swasta sampai saat ini telah memiliki GPA yang cukup sesuai rombongan belajar dan jumlah jam pelajaran pendidikan agama. Tapi, jika jumlah GPA tersebut dilihat dari status kepegawaian, yaitu PNS dan tingkat pendidikan, maka baik SMP Negeri maupun SMP Swasta masih mengalami kekurangan GPA. Selain itu, pendistribusian GPA yang berstatus PNS cenderung kurang merata, misalnya terdapat SMP Swasta yang memiliki 2 orang GPA berstatus

PNS, sementara SMP lainnya belum ada.

Namun demikian, SMP Katolik dan SMP Kristen tidak mengharuskan GPA yang berstatus PNS. Hal ini terungkap melalui wawancara dengan Kepala SMP Kristen (Advent dan GPIB) dan Kepala SMP Katolik (Santo Mikail dan Yos Sudarso) sampai saat ini dan yang akan datang pihak gereja tidak mengharuskan GPA yang bertugas di sekolahnya berstatus PNS. Sebab gereja mengangkat GPA dengan beberapa kriteria, di antaranya, GPA tersebut berpendidikan sarjana (S1) lulusan Theologi/Agama Institut Pastoral Indonesia (IPI) Bandung atau Malang atau dari UKI Tomohon Manado dan telah mengabdikan di gereja minimal 3 tahun berturut-turut dengan nilai yang memuaskan. Tapi khusus Kepala SMP Katolik Santo Mikail menuturkan bahwa, pihak yayasan (gereja) bersedia menerima GPA berstatus PNS bagi GPA Islam, dan Buddha. Dan setahun yang lalu sudah mengusulkan ke Dep. Agama, agar diberikan GPA Islam dan GPA Buddha berstatus PNS, tapi sampai sekarang usulan tersebut belum dipenuhi. Karena itu, langkah selanjutnya yayasan menghubungi seorang ustadz untuk menjadi GPA Islam di sekolah ini.

Karena menurut rencana tahun pelajaran 2006/2007 di SMP ini bagi siswa yang beragama Islam, meskipun jumlahnya sedikit akan disediakan waktu dan tempat untuk belajar agama, demikian pula halnya siswa beragama Buddha. Hal ini dilakukan karena di SMP ini sejak tahun 2004/2005 diberlakukan Kurikulum 2004 (KBK), di mana kurikulum tersebut menuntut adanya penilaian (nilai hasil belajar) tentang pengetahuan dan pemahaman konsep serta penerapannya (praktek) bagi setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pendidikan agama. Penilaian tersebut hanya dapat dilakukan oleh GPA Islam bagi siswa beragama Islam dan GPA Buddha bagi siswa beragama Buddha, ini berbeda dengan SMP Katolik dan Kristen lainnya. Menurut Kepala SMP Kristen Advent, di sekolahnya siswa hanya diajarkan pendidikan agama Kristen, sebab memang semua (100%) siswa beragama Kristen. Juga menurut Kepala SMP Kristen GPIB dan Kepala SMP Katolik Yos Sudarso, di sekolahnya tidak akan diajarkan pendidikan agama Islam, atau agama Buddha, meskipun di sekolahnya terdapat siswa beragama Islam atau beragama Buddha. Karena hal ini sudah menjadi

kesepakatan bersama antara orangtua siswa dengan pihak yayasan.<sup>3</sup>

Begitupun dari 48 Guru Pendidikan Agama (GPA) SMP Swasta yang tersebar pada 28 SMP memiliki usia dan masa kerja yang cukup bervariasi. Jika GPA SMP Swasta dilihat dari segi usia, maka terbanyak adalah GPA yang telah berusia antara 32-40 tahun, yaitu 20 orang (41,67%), kemudian usia antara 41-50 tahun 17 orang (35,42%), berikutnya GPA berusia 31 tahun atau kurang dari 31 tahun 5 orang (10,42%), sedangkan GPA berusia antara 51-55 tahun hanya sebagian kecil, 4 orang (8,33%), bahkan GPA berusia lebih dari 56 tahun hanya 2 orang (4,17%). Ini menunjukkan, bahwa GPA berusia kurang dari 50 tahun jumlahnya sebagian besar, yaitu 42 orang (87,50%). Dengan kata lain, dalam waktu 5 tahun yang akan datang, GPA yang akan pensiun hanya 2 orang (4,17%) dan dalam waktu 10 tahun yang akan datang 6 GPA (12,50%) yang memasuki masa pensiun.

Adapun GPA SMP Swasta menurut masa kerja, maka terbanyak adalah GPA yang telah

memiliki masa kerja antara 5-10 tahun, yaitu 21 orang (43,75%), kemudian antara 11-20 sebanyak 12 orang (25%), sedangkan GPA yang memiliki masa 4 tahun atau kurang 4 tahun terdapat 11 orang (22,92%), dan hanya sebagian kecil (3 orang atau 6,25%) GPA yang telah memiliki masa kerja antara 21-30 tahun.

## Kebijakan dalam Pemenuhan GPA

### *Kebijakan Pemerintah*

Dalam wawancara dengan Kasi Mapenda Kantor Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, mengungkapkan bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam pemenuhan GPA di SMP adalah mengangkat GPA yang telah lulus seleksi CPNS. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan mengakui dan menyadari, bahwa jumlah GPA yang diangkat belum berdasarkan kebutuhan riil GPA baik di SMP Negeri maupun SMP Swasta. Tapi yang dilakukan adalah mengangkat GPA

<sup>3</sup>Wawancara dilaksanakan di SMP masing-masing pada tanggal 10 dan 11 Mei 2006.

sesuai kemampuan riil anggaran yang tersedia. Ini dilakukan pemerintah karena keterbatasan alokasi anggaran, khususnya pengangkatan GPA, meskipun pemerintah sudah berusaha dengan maksimal mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan GPA. Usaha maksimal yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat GPA antara lain, adalah memprioritaskan pengangkatan GPA dengan menempuh kebijakan mengurangi jatah pengangkatan PNS pada unit-unit lainnya. Namun, berdasarkan kenyataan bahwa pengangkatan GPA yang berstatus PNS yang akan bertugas di SMP belum dapat memenuhi kebutuhan riil GPA di SMP, terutama pemenuhan GPA di SMP Swasta.

Di samping itu, dalam rangka pemenuhan GPA di SMP pemerintah juga mengambil langkah kebijakan dengan mengangkat guru bantu, tapi kebijakan ini pun sangat terkait dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu, pengangkatan guru bantu pada dasarnya kurang mujarab untuk memecahkan masalah kekurangan GPA, sebab selain honorinya masih kadang-kadang terlambat pembayar-

annya. Juga para guru bantu tersebut setiap ada pengangkatan GPA (PNS) selalu menuntut pemerintah agar mereka diangkat sebagai PNS. Meskipun pemerintah memprioritaskan para guru bantu tersebut untuk diangkat GPA (PNS), tapi karena alasan keterbatasan anggaran yang tersedia, maka mereka tidak mungkin diangkat semuanya sebagai GPA yang berstatus PNS dalam waktu yang bersamaan, tapi mereka antri menunggu giliran dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, antara faktor latar belakang pendidikan dan kesesuaiannya dengan GPA, pengalaman menjadi GPA, usia dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, berdasarkan kenyataan di SMP Negeri, bahwa sampai saat ini GPA yang tersedia sebanyak 67 orang (51,94%) yang terdiri dari GPA status PNS sebanyak 46 orang (68,66%), GPA status Non PNS 21 orang (31,34%) Padahal GPA yang dibutuhkan di SMP Negeri sebanyak 129 orang (51,94%). Ini menunjukkan, bahwa GPA untuk semua agama (siswa beragama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha) masih kekurangan GPA sebanyak 62 orang (48,06%).

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan di Kantor Departemen Agama dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada tanggal 8 Mei 2006.

Jika memperhatikan dengan cermat data pada table di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 43 orang GPA Islam yang tersedia di SMP Negeri sebagian besar, yaitu 36 orang (83,72%) berstatus PNS, kemudian dari 3 GPA Buddha di antaranya 2 orang (66,67%) berstatus PNS dan bahkan GPA Hindu yang tersedia 3 orang semuanya (100%) berstatus PNS. Sedangkan GPA Katolik dan Kristen yang tersedia di SMP Negeri masih sebagian besar GPA tersebut berstatus Non PNS.

Selanjutnya, bagaimana implikasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan GPA di SMP Swasta. Hal ini dapat diketahui dari sejauh mana pemenuhan GPA, terutama GPA berstatus PNS.

Berdasarkan data GPA berstatus PNS di SMP Swasta, diketahui bahwa hanya 9 orang (18,75%) dari 48 GPA, berarti terdapat sebagian besar GPA Non PNS, yaitu sebanyak 39 orang (81,25%). Selain itu, pemenuhan GPA untuk siswa berdasarkan agamanya, khususnya siswa yang beragama Kristen, Hindu dan Buddha belum memiliki GPA berstatus PNS. Padahal sebenarnya ketersediaan GPA status PNS bagi siswa yang beragama Kristen, Hindu dan Buddha dibutuhkan di SMP Swasta, khususnya SMP Swasta

yang memiliki siswa yang beragama Kristen, Hindu dan Buddha.

Oleh karena ketersediaan GPA (PNS dan Non PNS) di SMP Swasta hanya berjumlah 48 orang. Tapi, ternyata GPA yang dibutuhkan untuk semua agama siswa (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha) sebanyak 72 orang (66,67%), maka berarti SMP Swasta masih mengalami kekurangan GPA sebanyak 24 orang (33,33%).

## Kebijakan Yayasan/Sekolah

### *SMP Negeri:*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala SMP Negeri, di antaranya Kepala SMP Negeri 1 dan Kepala SMP Negeri 2 dapat diketahui, bahwa kebijakan yang ditempuh untuk memenuhi GPA sesuai agama yang dianut siswa (Islam, Katolik, Kristen, Hindu atau Buddha) adalah melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan untuk berkordinasi dalam mengadakan GPA di sekolahnya, terutama untuk pemenuhan GPA berstatus PNS. Oleh karena pemenuhan GPA berstatus PNS baik yang diangkat oleh Dinas Pendidikan maupun Kantor Departemen Agama

mengalami proses yang panjang. Sementara kehadiran GPA tersebut sangat diperlukan, maka pihak sekolah menempuh kebijakan lainnya untuk segera memenuhi GPA yang dibutuhkan, yaitu dengan cara melalui musyawarah dan mufakat dengan Pengurus Komite Sekolah untuk mengangkat GPA honorer (Non PNS). Karena itu, GPA honorer di SMP Negeri diangkat dan digaji oleh Komite Sekolah.<sup>5</sup>

### *SMP Swasta:*

Kebijakan yang ditempuh oleh SMP Swasta dalam pemenuhan kebutuhan GPA cukup bervariasi dan sangat terikat dan terkait dengan karakteristik dan ciri khas SMP Swasta tersebut, terutama yang berkaitan dengan visi-misi masing-masing ciri khas SMP Swasta. Namun, dari beberapa ciri khas SMP Swasta tersebut dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

### *SMP Swasta Berciri khas Islam*

Dalam wawancara dengan beberapa Kepala SMP Swasta yang

berciri khas Islam, di antaranya Kepala SMP Al Hassan, Kepala SMP Ibnu Khaldun dan Kepala SMP Sabial Muhtadin mengungkapkan, bahwa SMP ini program pendidikan agamanya berbeda dengan SMP Negeri atau SMP Swasta lainnya, seperti SMP Airlangga, SMP Panca Dharma dan sejenisnya. SMP Swasta berciri khas Islam ini semua siswa, guru dan karyawannya beragama Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah ini minimal meliputi: Aqidah-Akhlak, Fiqh, Qur'an-Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk itu, GPA yang dibutuhkan adalah GPA yang tidak hanya mampu mengalihkan pengetahuan pendidikan agama kepada siswa. Tapi jauh lebih penting adalah GPA tersebut, selain memiliki kepribadian yang handal, juga mampu menginternalisasikan paham dan nilai-nilai ajaran Islam yang dapat mengarahkan sikap dan perilaku siswa. Sebab pendidikan agama Islam pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada setiap siswa, sehingga siswa SMP di sini tidak hanya diharapkan mampu untuk menguasai ilmunya. Tapi yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dilakukan di Sekolah masing-masing pada tanggal 8 - 9 Mei 2006

tidak kurang pentingnya adalah siswa juga diharapkan mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di manapun mereka berada.

Dengan demikian, pihak yayasan telah menempuh berbagai langkah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan GPA (Ustadz) di sekolahnya. Langkah-langkah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Langkah pertama, adalah pihak yayasan merekrut GPA (ustadz) dari pondok pesantren. Dalam hal ini GPA (Ustadz) yang direkrut dari pondok pesantren adalah GPA (Ustadz) yang direkomendasikan oleh kyai atau pengasuh pesantren. Sebab dengan rekomendasi dari kyai atau pengasuh pesantren, pihak yayasan yakin bahwa GPA (ustadz) tersebut memiliki kemampuan profesional yang tidak diragukan, terutama kemampuan yang berkaitan dengan keberibadiannya.

Langkah kedua, adalah pihak yayasan merekrut GPA (Ustadz) dari SMP Swasta melalui kerjasama antar yayasan, terutama SMP Swasta yang berciri khas Islam dan tidak terlalu berjauhan dengan SMP tempat tugasnya, misalnya, beberapa GPA (Ustadz) yang mengajar di SMP Al Hassan, juga mengajar di SMP Yayasan Pendidikan Islam, atau di SMP Ibnu Khaldun.

Langkah ketiga, adalah para pelamar untuk menjadi GPA yang sudah memasukkan surat lamarannya ke yayasan dipanggil. Tapi sebelum GPA tersebut diterima, terlebih dahulu calon GPA mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh pihak yayasa. Seleksi tersebut dilaksanakan secara tertulis dan lisan (interview) dalam waktu yang bersamaan, setelah dinyatakan lulus dengan kriteria kelulusan yang ditentukan oleh pihak yayasan, maka calon GPA tersebut diujicoba selama 3 bulan, yaitu calon GPA tersebut mengajar pendidikan agama sesuai bidang keahliannya, misalnya mengajar mata pelajaran fiqih. Selama dalam masa uji coba, calon GPA tersebut sudah diberi upah sebanyak 85% dari upah semestinya. Jika calon GPA tersebut selama dalam uji coba menurut kriteria pihak yayasan hasilnya memuaskan, maka selanjutnya calon GPA tersebut diangkat sebagai GPA oleh yayasan dengan status GPA tetap. Menurut Kepala SMP Al Hassan dan Kepala SMP Ibnu Khaldun, umumnya yang memasukkan lamaran untuk menjadi GPA di SMP Swasta berciri khas Islam adalah mereka yang baru lulus dari IAIN, STAIN atau PTAIS, mereka masih berusia relative muda (sekitar 22 tahun) dan belum berpengalaman

sebagai GPA. Karena itu, mereka harus melalui beberapa tahap seleksi untuk mengetahui tingkat kemampuannya sebagai GPA, khususnya GPA di SMP Swasta yang berciri khas Islam.

Selanjutnya, kepala SMP ini menuturkan, bahwa GPA yang memasukkan lamaran, meskipun telah diangkat sebagai GPA status guru tetap yayasan dengan melalui seleksi yang ketat. Tapi mereka ini sering bermasalah, sebab mereka kalau ada pendaftaran CPNS mereka secara diam-diam mendaftar sebagai CPNS, kemudian ikut seleksi dan jika lulus seleksi CPNS, pihak pemerintah menugaskan ke SMP Negeri atau ke SMA Negeri, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yayasan, sehingga dengan mendadak SMP Swasta tempat mengajar kehilangan GPA.

Langkah keempat, adalah memajukan surat permohonan tentang pengadaan GPA kepada Kepala Kantor Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan. Pihak yayasan mengajukan surat permohonan ini dengan tujuan untuk memperoleh GPA berstatus PNS

agar biaya pendidikan yang ditanggung pihak yayasan dapat berkurang dengan adanya GPA status PNS. Tapi kenyataannya sampai saat ini permohonan tersebut belum dikabulkan.

Berdasarkan pengalaman Kepala SMP ini GPA (ustadz) keluaran atau lulusan perguruan tinggi Islam, seperti IAIN, STAIN atau PTAIS yang tidak pernah melalui pendidikan pesantren, kurang mampu untuk mengajarkan pendidikan agama, misalnya bacaan Qur'an kurang fasih, selain itu mereka kurang mampu dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada siswa. Karena itu, yayasan selalu mengusulkan ke Departemen Agama agar mengutamakan mengangkat GPA dari lulusan IAIN, STAIN atau PTAIS (sarjana) yang pernah belajar di pesantren. Tapi usulan ini belum pernah dikabulkan oleh Departemen Agama, sehingga GPA di SMP Swasta yang berciri khas Islam masih sebagian besar tenaga honorer (Non PNS), padahal SMP Swasta bercirikan Islam sangat membutuhkan GPA yang berstatus PNS guna meringankan beban biaya yayasan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dilakukan di sekolah masing-masing pada tanggal 10 Mei 2006.

## SMP Swasta Berciri khas Katolik dan Kristen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP Kristen Advent, Kepala SMP Kristen GPIB, Kepala SMP Katolik Santo Mikail dan Kepala SMP Katolik Yos Sudarso dapat diketahui, bahwa kebijakan yang ditempuh dalam pemenuhan GPA di sekolahnya adalah sepenuhnya ditetapkan oleh yayasan (gereja). Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru tidak diikutkan dalam merekrut GPA, kecuali jika kepala sekolah atau guru tersebut adalah pengurus yayasan. Tapi, jika ada kepala sekolah atau guru yang sekaligus pengurus yayasan, maka dalam merekrut GPA mereka berbicara atas nama dan kepentingan yayasan (gereja), tidak boleh mengatasnamakan kepala sekolah atau guru.

Dalam pemenuhan GPA di sekolahnya, pihak yayasan (gereja) tidak mengharuskan GPA berstatus PNS. Sebab gereja mengangkat GPA dengan beberapa kriteria, di antaranya, GPA tersebut berpendidikan sarjana (S1) lulusan Theologi/Agama Institut Pastoral Indonesia (IPI) Bandung atau Malang atau UKI Tomohon Manado dan telah mengabdikan di gereja minimal

3 tahun berturut-turut dengan nilai yang memuaskan.

Namun demikian, khusus Kepala SMP Katolik Santo Mikail menuturkan bahwa, pihak yayasan (gereja) bersedia menerima GPA berstatus PNS bagi GPA Islam dan Buddha. Dan setahun yang lalu sudah mengusulkan ke Departemen Agama, agar diberikan GPA Islam dan GPA Buddha berstatus PNS, tapi sampai sekarang usulan tersebut belum dipenuhi. Karena itu, langkah selanjutnya pihak yayasan menghubungi seorang ustadz untuk menjadi GPA Islam di sekolah ini. Karena menurut rencana pada tahun 2006/2007 di SMP ini bagi siswa beragama Islam, meskipun jumlahnya sedikit akan disediakan waktu dan tempat untuk belajar agama, demikian pula halnya siswa beragama Buddha. Hal ini dilakukan karena di sekolah ini sejak tahun pelajaran 2004/2005 diberlakukan Kurikulum 2004 (KBK), di mana kurikulum tersebut menuntut adanya penilaian (nilai hasil belajar) tentang pengetahuan dan pemahaman konsep serta penerapannya (praktek) pada setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pendidikan agama. Penilaian tersebut hanya dapat dilakukan oleh GPA Islam bagi siswa yang beragama Islam dan

GPA Buddha bagi siswa yang beragama Buddha. Akan tetapi, menurut Kepala SMP Kristen GPIB dan Kepala SM,P Katolik Yos Sudarso, di sekolahnya tidak akan diajarkan pendidikan agama Islam, atau agama Buddha, meskipun di sekolahnya terdapat siswa yang beragama Islam atau siswa beragama Buddha. Karena hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara orangtua siswa dengan pihak yayasan.<sup>7</sup>

### **SMP Swasta Bernuansa Nasional**

Melalui wawancara dengan beberapa Kepala SMP Swasta yang bernuansa nasional, di antaranya Kepala SMP Sinar Pancasila (Bapak H. Pardi Wiranto) mengungkapkan, bahwa kebijakan yang ditempuh yayasan/sekolah dalam pemenuhan GPA sesuai agama yang dianut siswa, adalah melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan untuk berkordinasi dalam mengadakan GPA di sekolahnya, terutama untuk pemenuhan GPA berstatus PNS. Tapi usulan tersebut

sampai sekarang belum terpenuhi dan hampir setiap tahun usulan tersebut diperbaharui. Sementara kehadiran GPA, terutama GPA berstatus PNS sangat diperlukan, maka pihak sekolah menempuh kebijakan lainnya untuk segera memenuhi GPA yang dibutuhkan, yaitu dengan cara melalui musyawarah dan mufakat antara pengurus yayasan, kepala sekolah, guru dan pengurus komite sekolah untuk mengangkat GPA honorer (Non PNS). Oleh karena GPA honorer tersebut 1 orang mendadak pindah tugas ke SMP Negeri atau ke SMA Negeri, sebab GPA tersebut telah lulus seleksi CPNS dan diangkat sebagai PNS, maka di sekolah ini hanya memiliki GPA Islam 1 orang, padahal rombongan belajar ada 13, sehingga sangat tidak efektif dan efisien jika hanya ditangani oleh seorang GPA Islam.

Kebijakan lainnya yang ditempuh untuk mengatasi masalah pemenuhan GPA adalah mengangkat guru mata pelajaran IPS, tapi guru tersebut memiliki kemampuan sebagai GPA Islam, sebab memiliki latar pendidikan madrasah aliyah, kemudian menyelesaikan studinya (sarjana) di IKIP.

---

<sup>7</sup>Wawancara dilaksanakan di SMP masing-masing pada tanggal 10 dan 11 Mei 2006.

Lebih lanjutnya Bapak Pardi mengungkapkan, bahwa di SMP Swasta cukup banyak guru mata pelajaran umum merangkap sebagai GPA, tidak hanya sebagai GPA Islam, tapi juga GPA Katolik, Kristen, Hindu atau GPA Buddha. Kebijakan ini ditempuh untuk pemenuhan GPA, terutama jika ada GPA yang secara mendadak pindah tugas ke SMP Negeri, karena mereka telah diangkat sebagai PNS. Menurut Pak Pardi yang penting bagi guru mata pelajaran umum yang merangkap sebagai GPA adalah guru tersebut memiliki kemampuan dan wawasan yang luas dalam bidang pendidikan agama yang diajarkan, terutama guru tersebut memiliki keperibadian yang baik dan dapat dijadikan contoh oleh siswa dan orangtua siswa serta masyarakat umumnya.<sup>8</sup>

Dengan demikian, berbagai kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun yayasan/sekolah dalam rangka pemenuhan GPA di SMP. Dan dari berbagai kebijakan tersebut hasilnya dapat dilihat pada table 8 dan 9 sebagaimana tersebut di atas.

## Analisis

### *Distribusi dan Ketercukupan GPA*

Di antara komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat human resources, yang selama ini cukup mendapat perhatian baik dari pihak Dinas Pendidikan maupun Departemen Agama adalah Guru Pendidikan Agama (GPA). Besarnya perhatian terhadap GPA, antara lain adalah didasarkan atas suatu pengalaman dan keyakinan, bahwa di tangan GPA lah kualitas pendidikan agama banyak bergantung. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, bahwa tidak berdayanya pendidikan agama, terutama pendidikan agama di sekolah umum, jika tidak ditangani secara profesional oleh GPA yang berkompoten. Dalam hal ini, GPA dipandang sebagai faktor kunci, karena GPA yang berinteraksi secara langsung dengan siswa dalam proses belajar mengajar, baik melalui program intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Kadar kualitas GPA ternyata dipandang sebagai penyebab kadar kualitas output sekolah. Rendah dan

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada tanggal 12 Mei 2006.

merosotnya kualitas pendidikan agama di sekolah sebagaimana yang sering disinyalir oleh masyarakat, hampir selalu disertai dengan menuding GPA nya. Misalnya, jika ada tawuran antar siswa, maka yang menerima kritikan tajam dan sadis dari masyarakat adalah “pendidikan agama” di sekolah, tentunya kritikan tersebut juga ditujukan kepada GPA di sekolah.

Sebagai GPA yang bertugas mengajar dan mendidik siswa melalui pendidikan agama, maka GPA akan melaksanakan berbagai macam kegiatan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut, GPA harus mampu memainkan peran dan fungsinya baik sebagai innovator, dinamisator, evaluator maupun fasilitator.

Demikian besarnya peran dan fungsi GPA dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama bagi siswa. Akan tetapi, jika kita kembali mencermati faktor pendistribusian dan ketercukupan GPA baik di SMP Negeri maupun di SMP Swasta, maka akan ditemukan berbagai masalah. Masalah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan agama di sekolah.

Pendistribusian dan ketercukupan GPA bagi SMP Negeri, tampaknya cukup berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat, di mana umumnya SMP Negeri telah memiliki GPA yang cukup dan sesuai dengan agama bagi siswa. Artinya siswa SMP Negeri telah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh GPA yang seagama. Selain itu, GPA tersebut umumnya telah memenuhi kualifikasi sebagai GPA, khususnya dari faktor tingkat dan latar belakang pendidikan, misalnya GPA di SMP Negeri umumnya adalah sarjana (S1) dari Fakultas Tarbiyah.

Adapaun pendistribusian dan ketercukupan GPA bagi SMP Swasta, tampaknya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan cukup banyak menghadapi berbagai masalah yang cukup akut. Hal ini dapat dilihat, di mana seluruh SMP Katolik dan SMP Kristen sampai saat ini hanya menyediakan GPA Katolik dan GPA Kristen dan hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik dan Kristen. Padahal di SMP Katolik dan Kristen tersebut (kecuali SMP Kristen Advent semua siswanya beragama Kristen) terdapat siswa yang beragama Islam, siswa beragama Buddha dan siswa

beragama Hindu. Meskipun dengan alasan, bahwa ada kesepakatan bersama antara orangtua siswa tersebut dengan yayasan (gereja) bahwa orangtuanya tidak keberatan, jika anaknya tidak belajar pendidikan agama di sekolah dengan pendidikan agama sesuai agama yang dianut anaknya. Oleh karena SMP Katolik dan SMP Kristen adalah satuan pendidikan nasional, maka apakah kesepakatan tersebut legal menurut hukum?

Di samping itu, faktor pendistribusian dan ketercukupan GPA di SMP Swasta, jika dilihat dari segi pemenuhan kuantitas, maka umumnya SMP Swasta telah memiliki GPA sesuai jumlah GPA yang dibutuhkan (sesuai rombongan belajar). Karena itu, dari segi pemenuhan kuantitas GPA di SMP Swasta tampaknya tidak ada masalah. Tapi, jika hanya pemenuhan kuantitas GPA dapat dilaksanakan, maka patut dipertanyakan, bagaimana tingkat kualitas GPA tersebut?

Dengan demikian, selain pemenuhan (ketercukupan) kuantitas GPA di SMP Swasta, juga tidak kalah pentingnya yang harus mendapat perhatian adalah pemenuhan (ketercukupan) kualitas GPA, sebab faktor kualitas GPA ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas pendidikan

agama di sekolah umum, terutama jika mengingat bahwa SMP Swasta di daerah ini lebih banyak dari SMP Negeri.

Di antara faktor yang turut menentukan tingkat kualitas GPA adalah faktor tingkat dan latar belakang pendidikan. Dalam hal ini, jika kita mencermati tingkat dan latar belakang pendidikan GPA di SMP Swasta, maka dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar masih berpendidikan tingkat Diploma, bahkan di antaranya hanya setingkat SLTA. Selain itu, meskipun di antara GPA tersebut telah berpendidikan sarjana (S1), tapi ternyata mereka tidak berasal dari Fakultas Tarbiyah. Misalnya, GPA Islam SMP Pancasila sebanyak 2 orang, semuanya adalah sarjana (S1) dari IKIP. Demikian pula halnya GPA SMP Nusantara sebanyak 2 orang semuanya sarjana (S1) dari IKIP, Juga GPA Kristen S1 dari lulusan Fakultas Ekonomi Unhas, sedangkan GPA Islam dari lulusan Fakultas Da'wah ini lumayan dari IAIN.

Dari segi status GPA SMP Swasta, maka sebagian besar (81,75%) adalah Non PNS, meskipun tidak ada jaminan bahwa GPA status PNS lebih berkualitas dari GPA status Non PNS. Tapi setidaknya, dari segi pembinaan GPA status PNS cenderung lebih baik,

jika dibanding dengan pembinaan GPA status Non PNS, sebab pembinaan GPA status Non PNS dengan berbagai alasan, terutama alasan biaya terbatas, maka dalam prakteknya di lapangan pembinaan GPA status PNS cenderung diprioritaskan baik oleh Dinas Pendidikan maupun Departemen Agama.

Namun demikian, pada sisi yang lain adanya GPA SMP Swasta umumnya Non PNS dapat membuktikan bahwa betapa besar perhatian dan peranan masyarakat dalam bidang pendidikan. Dan hal ini, merupakan kontribusi yang besar dilakukan masyarakat dalam ikut mencerdaskan bangsa. Meskipun terdapat beberapa Kepala SMP Swasta mengaku GPA yang bertugas di sekolahnya adalah berstatus PNS. Tapi, jika dicermati secara mendalam, maka sebenarnya GPA tersebut berstatus Non PNS, misalnya, di SMP PGRI 7 memiliki GPA Islam 2 orang (semua siswa beragama Islam), memang 2 orang GPA Islam tersebut adalah PNS. Tapi ternyata 2 orang GPA Islam tersebut tugas utamanya (SK. Pengangkatannya) adalah sebagai GPA Islam di SMP Negeri, mereka tugas di SMP PGRI 7 sebenarnya adalah sebagai GPA honorer. Demikian pula halnya GPA

Islam di SMP Muhammadiyah. Juga GPA SMP Pancasila sebanyak 2 orang, semuanya adalah PNS, tapi tugas utamanya adalah sebagai guru IPS, bukan sebagai GPA, Keadaan semacam ini banyak terdapat di SMP Swasta, sehingga hampir dapat dipastikan, bahwa GPA yang bertugas di SMP Swasta umumnya masih GPA status honorer (Non PNS).

Dengan demikian, pendistribusian dan ketercukupan GPA di SMP Negeri umumnya cukup berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat, di mana umumnya SMP Negeri telah memiliki GPA yang cukup dan sesuai dengan agama bagi siswa. Artinya siswa SMP Negeri telah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh GPA yang seagama., meskipun beberapa SMP Negeri menggunakan GPA honorer sebagai suatu kebijakan untuk mengatasi kekurangan GPA yang berstatus PNS. Namun, pengangkatan GPA honorer di SMP Negeri tetap memperhatikan dan memprioritaskan GPA yang telah memenuhi kualifikasi.

Sedangkan pendistribusian dan ketercukupan GPA di SMP Swasta umumnya belum berjalan dengan baik, terutama jika dilihat dari kua-

lifikasi GPA, masih ditemukan beberapa GPA tidak match dengan tingkat dan latar belakang pendidikannya. Misalnya, dari tingkat pendidikan seorang GPA lulusan D2, bahkan hanya lulusan SLTA mengajar di tingkat SMP. Dari latar belakang pendidikan, misalnya seorang GPA lulusan manajemen ekonomi, atau lulusan IKIP jurusan sejarah mengajar pendidikan agama. Hal ini menggambarkan, bahwa dalam penyebaran dan ketercukupan GPA di SMP Swasta hanya sekedar mencukupi, cenderung belum memprioritaskan masalah kualifikasi GPA tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa GPA yang telah memenuhi kualifikasi lebih berkualitas daripada GPA yang tidak berkualifikasi, tapi pada dasarnya GPA yang berkualifikasi secara akademik dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya.

### *Pemenuhan Kebutuhan GPA*

Bagaimana pun pemenuhan kebutuhan GPA menjadi faktor penting dan strategis. Prasarana dan sarana demikian pula kurikulum dapat saja kurang memadai, jika pemenuhan kebutuhan GPA tidak terpenuhi. Dalam hal ini, jika

memperhatikan dengan cermat faktor pemenuhan kebutuhan GPA baik di SMP Negeri maupun SMP Swasta, maka dapat dikatakan bahwa GPA di SMP Negeri dan SMP Swasta sudah memenuhi kebutuhan berdasarkan ratio GPA dengan rombongan belajar. Artinya setiap SMP baik negeri maupun swasta telah menyediakan GPA, sehingga siswa telah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh GPA yang seagama. Kecuali siswa di SMP Katolik dan SMP Kristen, di SMP ini belum semua siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, khususnya siswa yang beragama Islam, Hindu dan Buddha. Sebab memang di SMP ini sejak berdiri sampai sekarang tidak pernah membutuhkan GPA Islam, Hindu dan Buddha. SMP ini hanya membutuhkan GPA Katolik dan GPA Kristen, meskipun di SMP ini terdapat siswa yang beragama Islam, Hindu dan Buddha, kecuali di SMP Kristen Advent semua siswanya beragama Kristen.

Namun demikian, jika pemenuhan kebutuhan GPA di SMP, dilihat dari segi status kepegawaian, yaitu GPA berstatus PNS, maka GPA di SMP Negeri masih terdapat sebagian belum terpenuhi kebutuh-

annya. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sejumlah SMP Negeri menggunakan GPA honorer untuk memenuhi kebutuhan GPA status PNS, misalnya GPA di SMP Negeri 1 dengan jumlah rombongan belajar 33, masing-masing kelas 1, 2 dan 3 sebanyak 11 rombongan belajar, membutuhkan GPA 8 orang, terdiri dari 4 orang GPA Islam dan masing-masing seorang GPA Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha, dengan jam wajib mengajar GPA perminggu sebanyak 18 jam. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa di SMP Negeri kebutuhan GPA sudah terpenuhi berdasarkan ratio GPA dengan rombongan belajar, tapi dari 8 orang GPA yang tersedia, di antaranya berstatus PNS hanya 5 orang, kalau SMP Negeri 1 ini hanya menggunakan GPA berstatus PNS, maka kebutuhan GPA belum terpenuhi (kurang) sebanyak 3 orang GPA. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan GPA, maka Komite Sekolah di SMP Negeri 1 menempuh kebijakan untuk mengangkat 3 orang GPA honorer (GPA status Non PNS). Dalam hal ini, pengangkatan GPA honorer di SMP Negeri selalu memperhatikan dan memprioritaskan untuk mengangkat GPA honorer yang berkualifikasi. Kondisi pemenuhan kebutuhan GPA yang

demikian ini cukup banyak dialami oleh SMP Negeri di daerah ini.

Adapun pemenuhan kebutuhan GPA status PNS di SMP Swasta berdasarkan ratio GPA dengan rombongan belajar, pada dasarnya masih sangat jauh dari harapan, di mana hampir seluruh SMP Swasta menggunakan GPA honorer (GPA berstatus Non PNS). Hal ini, pada satu sisi dapat menunjukkan bahwa betapa besar perhatian dan peranan masyarakat dalam bidang pendidikan untuk ikutserta mencerdaskan kehidupan bangsa, selama GPA honorer tersebut berkualifikasi sebagai GPA. Sedangkan pada sisi lain, jika terdapat sebagian GPA honorer tersebut tidak berkualifikasi sebagai GPA, maka pada gilirannya akan terjadi proses pendangkalan pendidikan agama pada siswa (output) SMP Swasta, Meskipun, tidak ada jaminan bahwa GPA yang telah memenuhi kualifikasi lebih berkualitas daripada GPA yang tidak berkualifikasi, tapi pada dasarnya GPA yang berkualifikasi secara akademik dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya.

Di samping itu, dewasa ini kita sering prihatin menyaksikan munculnya satu trend dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah-sekolah swasta yang umumnya memiliki tenaga pendidik honorer, termasuk

SMP Swasta. Di mana sekolah-sekolah swasta berkembang menjadi sarana diskriminasi yang semakin memperlebar dan memperdalam jurang-jurang social, misalnya uang pangkal, uang gedung, uang ini dan itu semakin membengkak. Kenyataan pahit ini menutup kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi sekian banyak warga di daerah ini yang secara ekonomis kurang mampu. Namun, disadari sepenuhnya bahwa pendidikan dan persekolahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan GPA yang berkualifikasi dan berkualitas apalagi berstatus PNS membutuhkan biaya besar. Akan tetapi, apakah biaya besar selalu harus dibebankan ke pundak orangtua siswa ?

Jika memperhatikan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya kebijakannya dalam pemenuhan kebutuhan GPA di SMP, maka terdapat kecenderungan bahwa selama ini dan mungkin yang akan datang, umumnya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan GPA di SMP masih berpihak kepada SMP Negeri dengan berbagai alasan klasik, misalnya keterbatasan anggaran. Kondisi ini memberi alasan pada lembaga pendidikan untuk mengambil kebijakan dalam pemenuhan

GPA. SMP Negeri misalnya dengan melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan untuk berkordinasi dalam mengadakan GPA di sekolahnya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan GPA berstatus PNS. Sementara SMP swasta berupaya melalui yayasan dengan menempuh berbagai kebijakan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan GPA. Karena itu, umumnya SMP Swasta telah memiliki GPA, meskipun GPA tersebut berstatus Non PNS (honorar), sehingga siswa pada setiap SMP Swasta (kecuali SMP Katolik dan SMP Kristen) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh GPA yang seagama

## Kendala dalam Pemenuhan GPA

### *Faktor Internal*

#### *SMP Negeri*

Umumnya SMP Negeri tidak mengalami kendala internal yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan GPA. Karena umumnya kebijakan pemerintah (Dinas Pendidikan dan Departemen Agama) mengenai

pemenuhan kebutuhan GPA cenderung berpihak kepada SMP Negeri, terutama pemenuhan kebutuhan GPA berstatus PNS, jika dibanding dengan pemenuhan kebutuhan GPA di SMP Swasta.

Di samping itu, umumnya SMP Negeri telah memiliki Komite Sekolah yang aktif dalam memainkan peranannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik termasuk GPA. Karena itu, jika di SMP Negeri membutuhkan GPA, maka Komite Sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Departemen Agama. Selain itu Komite Sekolah melalui musyawarah dan mufakat mengangkat GPA honorer (GPA Non PNS) serta memberi upah (honor) yang pantas dan memadai.

### *SMP Swasta*

Kalau umumnya SMP Negeri tidak mengalami kendala internal yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan GPA. Tapi SMP Swasta sebaliknya, yaitu umumnya SMP Swasta mengalami kendala internal dalam pemenuhan kebutuhan GPA.

Jika memperhatikan secara sepiantas, maka dapat dikatakan bahwa umumnya kendala yang dihadapi oleh yayasan (SMP Swasta) dalam

pemenuhan kebutuhan GPA adalah faktor dana, di mana diketahui bahwa sebagian besar GPA adalah tenaga honorer, yaitu gaji/upah GPA tersebut ditanggung oleh yayasan. Sementara itu, yayasan memiliki sumber dana yang terbatas, bahkan hanya mengandalkan kepada iuran sumbangan pendidikan siswa. Pada hal hampir sebagian besar siswa di SMP Swasta berasal dari keluarga secara ekonomis kurang mampu.

Faktor keterbatasan dana inilah yang dijadikan kendala pertama dan utama oleh umumnya pihak yayasan SMP Swasta, sehingga kurang mampu mengangkat GPA yang berkualifikasi. Sebab umumnya GPA yang mengantongi kualifikasi dan sertifikasi kurang bersedia dibayar dengan upah (honor) yang kurang mencerminkan martabat GPA sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum. Artinya umumnya yayasan kurang mampu memberi jaminan kesejahteraan sosial GPA yang pantas dan memadai, misalnya umumnya GPA di SMP Swasta tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Faktor inilah yang menyebabkan GPA di SMP Swasta secara diam-diam mendaftar ikut seleksi CPNS sebagai usaha untuk meninggalkan tugasnya sebagai GPA honorer, ter-

utama bagi GPA honorer yang telah mengantongi kualifikasi atau sertifikasi untuk diangkat sebagai GPA dengan status PNS. Karena itu, sering terjadi GPA di SMP Swasta secara mendadak pindah ke SMP Negeri atau SMA Negeri sebab mereka telah lulus seleksi CPNS dan telah diangkat sebagai GPA status PNS. Jika hal ini terjadi, maka umumnya pihak yayasan mengangkat GPA tanpa mempertimbangkan faktor kualifikasi atau sertifikasi GPA yang diangkat tersebut, yang penting proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Namun demikian, jika diperhatikan secara cermat dan mendalam, dapat dikatakan bahwa bukanlah faktor dana sebagai kendala pertama dan utama yang dihadapi umumnya yayasan dalam pemenuhan kebutuhan GPA yang berkualifikasi di SMP Swasta. Tapi, pada hakekatnya adalah faktor pertama dan utamanya adalah kendala dari pihak yayasan SMP Swasta dan pengurusnya yang kurang profesional dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Dalam hal ini, umumnya pihak yayasan dan pengurusnya cenderung berpikir bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat

tergantung kepada kondisi bangunan (fisik). Hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan (fisik) umumnya SMP Swasta di daerah ini tidak kalah dengan SMP Negeri yang dibangun oleh pemerintah dengan anggaran yang besar. Ini menunjukkan, bahwa yayasan SMP Swasta memiliki sumber dana yang memadai. Artinya, pihak yayasan SMP Swasta umumnya berkoncentrasi pada aspek fisik kuantitatif, sehingga menelorkan konsekuensi yang serius, yaitu cenderung faktor kualitas dikorbankan, karena kurang diimbangi oleh tenaga pendidik, termasuk GPA yang berkualifikasi.

### *Faktor Eksternal*

#### *SMP Negeri*

Kendala ekstrenal yang dihadapi umumnya SMP Negeri dalam pemenuhan kebutuhan GPA, terutama GPA honorer (Non PNS) adalah setiap dibuka seleksi CPNS selalu meminta "Surat Keterangan" kepada Kepala SMP dan Komite Sekolah sebagai bukti bahwa mereka telah mengabdikan dan memiliki pengalaman sebagai GPA. Dengan modal surat keterangan tersebut mereka ikutserta seleksi CPNS, tapi setelah mereka mengikuti seleksi CPNS dan ternyata tidak lulus, me-

reka memprotes Kepala SMP dan Anggota Komite Sekolah tempat mereka bertugas. Bahkan di antara mereka ada yang mengancam untuk berhenti sebagai GPA honorer. Jika Kepala SMP dan Anggota Komite Sekolah tidak segera megusahakan agar mereka diluluskan dalam seleksi CPNS. Padahal, sesungguhnya baik Kepala SMP maupun Anggota Komite Sekolah sama sekali tidak memiliki wewenang dalam menentukan kelulusan GPA honorer yang mengikuti seleksi CPNS.

Di samping itu, GPA honorer yang tidak lulus seleksi CPNS tingkat disiplinnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai GPA sudah mulai menurun, mereka sering terlambat (hadir tidak sesuai dengan jadwal jam mengajarnya), bahkan kadang-kadang tidak hadir tanpa keterangan. Juga, dalam proses belajar mengajar kurang bersemangat, sering terjadi siswa diberi tugas kemudian mereka pergi tanpa seizin dengan guru piket. Dan lebih parah lagi, jika mereka mempengaruhi rekan-rekannya, agar tidak terlalu aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai GPA.

### *SMP Swasta*

Kehadiran SMP Swasta di daerah ini sangat membantu peme-

rintah, khususnya dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Karena itu, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 41 ayat (3) menyebutkan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Tapi, kenyataannya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya kebijakannya dalam pemenuhan kebutuhan GPA di SMP, selama ini masih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan GPA di SMP Negeri. Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan GPA di SMP Swasta sampai saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Artinya campur tangan pemerintah yang menguntungkan pihak yayasan SMP Swasta belum berjalan. Tapi, campur tangan pemerintah yang tidak menguntungkan pihak yayasan SMP Swasta sudah berjalan. Misalnya, pemerintah lebih cenderung bertindak sebagai penguasa dalam menangani mutasi GPA di SMP Swasta, khususnya GPA yang telah diangkat menjadi PNS. Dalam hal ini, pihak pemerintah memutasikan GPA di SMP Swasta yang telah

diangkat menjadi PNS ke SMP Negeri atau ke SMA Negeri, tanpa terlebih dahulu konsultasi dengan pihak yayasan SMP Swasta. Perlakuan pemerintah terhadap pihak yayasan SMP Swasta semacam ini sering membuat pihak yayasan kewalahan mencari dan menemukan GPA untuk mengganti GPA yang dimutasikan secara mendadak.

Di samping itu, sejak lahirnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu, maka pihak yayasan SMP Swasta mengalami kesulitan untuk menemukan calon GPA berkualifikasi yang bersedia untuk diangkat sebagai GPA honorer di SMP Swasta. Sebab umumnya calon GPA, terutama calon GPA yang berkualifikasi atau bersertifikasi lebih bersedia (memperioritaskan) untuk menjadi GPA honorer (guru bantu atau GPA kontrak) di SMP Negeri atau sekolah berstatus negeri. Karena, menurut mereka menjadi GPA honorer (guru bantu atau GPA kontrak) di SMP Negeri atau sekolah negeri lebih berpulang untuk segera diangkat menjadi PNS, jika dibanding menjadi GPA honorer di SMP Swasta.

Pada dasarnya lahirnya Keputusan Mendiknas tersebut tujuannya adalah baik, tapi penerapannya di

daerah ini belum menguntungkan pihak yayasan SMP Swasta. Karena pemerintah mengangkat guru bantu atau guru kontrak termasuk GPA Kontrak masih sebagian besar di tempatkan di SMP Negeri atau sekolah negeri lainnya. Padahal, pihak yayasan SMP Swasta (kecuali yayasan SMP Katolik dan SMP Kristen) sangat mengharapkan kehadiran GPA honorer (guru bantu atau GPA Kontrak) yang diangkat pemerintah. Karena, selain GPA honorer (guru Bantu atau GPA Kontrak) tersebut jelas berkualifikasi atau bersertifikasi, juga untuk meringankan biaya yang dikeluarkan oleh yayasan, sebab honorinya dibebankan kepada anggaran pemerintah.

Kendala lebih sulit lagi dihadapi oleh yayasan SMP Swasta yang jauh dari pusat kota atau di tempat terpencil, karena hampir tidak ada calon GPA yang bersedia diangkat sebagai GPA honorer, meskipun calon GPA tersebut tidak berkualifikasi atau bersertifikasi. Kalaupun ada calon GPA yang bersedia diangkat sebagai GPA honorer, maka GPA honorer tersebut paling lama 3 bulan sudah berhenti. Bahkan, di antaranya hanya 3 minggu, terutama jika GPA honorer tersebut mendapat pekerjaan yang lebih menguntungkan bagi dirinya.

## Kesimpulan

1. Jumlah siswa di SMP Negeri sebagian besar beragama Islam dan hanya sebagian kecil siswa yang beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Namun demikian, di SMP Negeri telah disediakan GPA sesuai kebutuhan. Karena itu, semua siswa di SMP Negeri telah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh GPA yang seagama.
2. Juga jumlah siswa di SMP Swasta sebagian besar beragama Islam dan hanya sebagian kecil siswa yang beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Bahkan hampir sebagian (48,27%) SMP Swasta siswanya 100% beragama Islam. Akan tetapi, di SMP Swasta belum semuanya menyediakan GPA sesuai kebutuhan. Karena itu, siswa di SMP Swasta belum semuanya mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh GPA yang seagama. Hal ini dapat dialmi oleh siswa di SMP Katolik Santo Mikail, SMP Katolik Yos Sudarso dan SMP Kristen GPIB.
3. Secara kuantitatif pemenuhan kebutuhan GPA di SMP Negeri dan SMP Swasta (kecuali di SMP Katolik Santo Mikail, SMP Katolik Yos Sudarso dan SMP Kristen GPIB) telah terpenuhi. Artinya siswa telah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh GPA yang seagama
4. Jika dilihat dari status GPA, maka di SMP Negeri memiliki sebagian besar GPA status PNS dan hanya sebagian kecil GPA status honorer (Non PNS). Dalam hal ini, GPA honorer (Non PNS) di SMP Negeri sebagian besar adalah GPA Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Sebaliknya, di SMP Swasta adalah sebagian besar GPA status honorer (Non PNS). Hal ini menunjukkan, bahwa betapa besar perhatian dan peranan masyarakat dalam bidang pendidikan.
5. Jika dilihat dari kualifikasi/serifikasi dan kompotesni GPA tersebut, maka GPA di SMP Negeri yang sebagian besar berstatus PNS, jelas telah berkualifikasi/bersertifikasi dan memiliki kompotesni. Tapi GPA di SMP Swasta yang sebagian

besar GPA status honorer (Non PNS) hampir sebagian besar GPA tersebut tidak berkualifikasi/bersertifikasi dan berkompetensi sebagai GPA di SMP. Misalnya, GPA masih lulusan D 1, bahkan hanya lulusan SLTA, atau GPA tersebut sarjana (S1), tapi sarjana (S1) nya dari latar belakang pendidikan umum, misalnya dari fakultas ekonomi.

6. Kebijakan pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Departemen Agama) dalam pemenuhan kebutuhan GPA di SMP selama ini masih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan GPA di SMP Negeri. Sementara pemenuhan kebutuhan GPA di SMP Swasta, khususnya GPA status PNS pemerintah daerah belum memperhatikannya.
7. Kebijakan sekolah (SMP Negeri) dalam pemenuhan kebutuhan GPA adalah melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan untuk berkordinasi dalam mengadakan GPA di sekolahnya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan GPA berstatus PNS. Oleh karena pemenuhan GPA

berstatus PNS baik yang diangkat oleh Dinas Pendidikan maupun Kantor Departemen Agama mengalami proses yang panjang. Sementara kehadiran GPA tersebut sangat diperlukan, maka pihak sekolah menempuh kebijakan lainnya untuk segera memenuhi GPA yang dibutuhkan, yaitu dengan cara melalui musyawarah dan mufakat dengan Pengurus Komite Sekolah untuk mengangkat GPA honorer (Non PNS). Karena itu, GPA honorer di SMP Negeri diangkat dan digaji oleh Komite Sekolah. Hal ini menunjukkan, bahwa komite sekolah yang beranggotakan orangtua/wali siswa, komunitas sekolah dan para tokoh masyarakat yang peduli pendidikan telah berusaha memainkan peranannya dalam memajukan pendidikan agama.

8. Kebijakan yayasan (SMP Swasta) dalam pemenuhan kebutuhan GPA adalah untuk yayasan SMP Swasta berciri khas Islam merekrut GPA dari pesantren, kerjasama antara yayasan, terutama SMP yang berdekatan dan juga merekrut GPA dari mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi

agama Islam. Selain itu, mengajukan permohonan bantuan GPA ke Departemen Agama, khususnya GPA status PNS. Sedangkan untuk yayasan SMP bernuansa nasional, mereka merekrut GPA dari SMP Negeri yang bersedia dan memiliki waktu sebagai GPA honorer. Selain itu, guru-guru mata pelajaran umum, terutama yang sudah sarjana dan dipandang mampu mengajar pendidikan agama diberi tugas sebagai GPA. Adapun untuk yayasan SMP Katolik dan Kristen sepenuhnya adalah tanggung jawab gereja. Dalam hal ini, pihak yayasan (gereja) menyiapkan GPA Katolik dan GPA Kristen yang didik untuk dipersiapkan sebagai GPA, yaitu di Institut Pastoral Indonesia (UPI) Bandung, Malang atau Tomohon Manado, setelah lulus dari perguruan tinggi ini, calon GPA tersebut dimantapkan melalui kegiatan kaderisasi di gereja sekitar 3 tahun.

9. SMP Negeri dan Yayasan SMP Katolik dan SMP Kristen hampir tidak mengalami kendala (faktor internal dan eksternal) yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan GPA.

Tapi, bagi Yayasan SMP Swasta (SMP Islam dan Nasional) mengalami kendala yang berarti dalam pemenuhan GPA. Kendala tersebut dari faktor internal adalah umumnya yayasan (pengurus) kurang profesional dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, mereka umumnya memandang bahwa mengelola dan menyelenggarakan pendidikan cukup dengan mendirikan bangunan (fisik), tapi bagaimana sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikuasai dengan baik. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh kurangnya sumber dana yang memadai sebagai penggerak terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan faktor eksternal adalah campur tangan pemerintah yang tidak menguntungkan pihak yayasan SMP Swasta, yaitu, pemerintah lebih cenderung bertindak sebagai penguasa dalam menangani mutasi GPA di SMP Swasta, khususnya GPA yang telah diangkat menjadi PNS. Dalam hal ini, pihak pemerintah memutasikan GPA di SMP Swasta yang telah diangkat menjadi PNS ke SMP Negeri atau ke SMA Negeri, tanpa terlebih

dahulu konsultasi dengan pihak yayasan SMP Swasta. Sebagai akibatnya, SMP Swasta sering secara mendadak kehilangan GPA, sedangkan untuk mencari dan menemukan penggantinya tidak mudah. Hal ini menyebabkan yayasan SMP Swasta mengangkat GPA dari guru mata pelajaran umum, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan apakah GPA tersebut berkualifikasi atau bersertifikasi.

Di samping itu, pihak yayasan SMP Swasta merasa sulit menemukan GPA honorer, khususnya calon GPA yang telah mengantongi kualifikasi/sertifikasi dan memiliki kompetensi sebagai GPA di SMP, terutama setelah pemerintah mengangkat guru bantu (guru kontrak). Sebab umumnya calon GPA, terutama calon GPA yang berkualifikasi/ bersertifikasi atau berkompotensi lebih bersedia (memperioritaskan) untuk menjadi GPA honorer (guru bantu atau GPA kontrak) di SMP Negeri atau sekolah berstatus negeri. Karena, menurut mereka menjadi GPA honorer (guru bantu atau GPA kontrak) di SMP Negeri atau sekolah negeri lebih berpeluang untuk segera diangkat menjadi PNS, jika dibanding

menjadi GPA honorer di SMP Swasta.

## Rekomendasi

1. Pihak yayasan SMP Swasta dalam mengangkat GPA honorer, sebaiknya tetap mempertimbangkan dan mengutamakan faktor kualifikasi atau sertifikasi dan kompotensi GPA yang diangkat.
2. Kehadiran SMP Swasta sangat membantu pemerintah, khususnya dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Karena itu, sebaiknya Pemerintah/ Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan GPA di SMP Swasta, terutama pemenuhan kebutuhan GPA berstatus PNS.
3. GPA Swasta yang telah diangkat sebagai PNS, sebaiknya Pemerintah/ Pemerintah Daerah tidak memutasikan GPA tersebut ke SMP Negeri atau sekolah negeri lainnya, tapi tetap menempatkannya di SMP Swasta tempat tugasnya.

## SUMBER BACAAN

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Dinas Pendidikan, *Statistik Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2006*. Balikpapan: Dinas Pendidikan, 2006.
- Kaufan, Roger, Akicia M. Rojas & Hanna Mayer, *Needs Assesment A. User's Guide, Education Tecknology*. New Jersey: Pubication, Englewood Cliffs, 1980
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Mitra Karya, 2003.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbara, 2006.